



Fenomena Penolakan Auditor Perempuan oleh *Auditee* Pandalungan

Ari Susanti Indra Swari, Unti Ludigdo, dan Ari Kamayanti

Program Magister Akuntansi, Pascasarjana FEB, Universitas Brawijaya

ari_indraswari@yahoo.com

doi:10.18382/jraam.v1i3.40

Informasi Artikel

Tanggal masuk	24-11-2015
Tanggal revisi	27-03-2016
Tanggal diterima	28-03-2016

Keywords:

Pandalungan,
Rejection,
Pandalungan Auditees,
Female Auditor,
Culture

Abstract

The study aimed at examining several reasons of the Pandalungan auditees' rejection to female auditors from the cultural side of Pandalungan. This study applied a qualitative approach with a model case study and interview as the data collection technique. Acting as the informants are Pandalungan auditees, a female auditor, a cultural observer and a community leader. As a basis of cultural side analysis, seven elements of the universal cultures are used, those are religious system, social system, knowledge system, languages, art, livelihood and life tool or technology system. The results indicated that the uncooperative attitude shown by the Pandalungan auditees was one of their ways to avoid female auditors who were more conscientious when doing an auditing process. An emergence of 'todus' or embarrassment sense was a reaction in response to female auditors' findings on their Monitoring Report (LHP), which were simply translated as indication of corruption, thus disturbing the Pandalungan auditees' dignity as a 'sokkla' human being (a good and obedient human being).

Kata kunci:

Pandalungan,
Penolakan,
Auditee Pandalungan,
Auditor Perempuan,
Budaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menelaah alasan dibalik penolakan *auditee* Pandalungan terhadap auditor perempuan dari sisi budaya Pandalungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian studi kasus dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Bertindak sebagai informan adalah *auditee* Pandalungan, auditor perempuan dan budayawan serta tokoh masyarakat. Sebagai sandaran analisis dari sisi budaya, digunakan tujuh unsur budaya universal yaitu sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian dan sistem peralatan hidup atau teknologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh *auditee* Pandalungan merupakan salah satu cara mereka menghindari auditor perempuan yang lebih teliti ketika proses pengawasan. Timbulnya rasa *todus* atau malu adalah reaksi dari temuan auditor perempuan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterjemahkan begitu saja sebagai indikasi korupsi, sehingga mengusik harga diri *auditee* Pandalungan sebagai manusia *sokkla* (manusia yang berlaku baik dan menghindari kemaksiatan).

1. Pendahuluan

Women keeping 'accounts', women 'mana-

ging', women 'accounting' in small businesses, 'accounting' in the home, accounting

'for' the home. These quotations, from publications from the late-17th or 18th centuries, by women or for women, raise a myriad of issues concerning who practised accounting, what keeping accounts involved and when and where it took place, prior to the 19th century (Kirkham and Loft : 2001).

Sekelumit dari tulisan Kirkham dan Loft (2001) dalam *The Lady and the Account Missing from Accounting History* memberikan gambaran singkat bahwa perempuan selain berperan sebagai ibu, istri, dan nyonya rumah, secara tidak sadar mereka juga berperan sebagai akuntan rumah tangga. Pada belahan bumi yang lain yaitu di Jepang, Komori (2006) menyatakan bahwa perempuan Jepang telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan posisi sosial mereka dan mempromosikan identitasin dependen mereka dan memiliki peran yang lebih emansipatoris bila dibandingkan dengan perempuan di dunia barat.

McNicholas, Humpries dan Gallhofer (2004) melakukan penelitian pada suku Maori di New Zealand. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa budaya patriarki yang kental mengakibatkan tertolaknya perempuan pada suatu profesi. Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan budaya juga mengalami hal serupa, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Budiati (2010) bahwa kaum perempuan di Indonesia masih terbelenggu oleh nilai-nilai budaya yang masih melekat dalam kehidupan, sehingga sulit untuk menemukan jati dirinya dan tidak berani untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Selama ini, dalam pembagian tugas kehidupan keluarga dan masyarakat lebih didasarkan pada persepsi tradisional. Bagi perempuan yang berani mengaktualisasikan diri dengan bekerja di luar rumah akan berpotensi untuk menimbulkan konflik dan perubahan sosial, karena sistem patriarki yang berkembang saat ini pada budaya Indonesia telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan baik kultural maupun struktural.

Budaya patriarki masyarakat Pandalungan saat ini mengalami perubahan seiring dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak perempuan Pandalungan yang diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan diluar rumah, entah dalam rangka membantu ekonomi keluarga maupun untuk aktualisasi dirinya. Tetapi, budaya patriarki belum menghilang sepenuhnya karena perempuan yang bekerja pada profesi tertentu masih mendapat reaksi negatif dari masyarakat Pandalungan.

Wawancara singkat yang dilakukan terhadap budayawan dan tokoh masyarakat yang diwakili oleh Kyai, memperoleh suatu kesimpulan awal bahwa budaya patriarki pada masyarakat Pandalungan membentuk kesadaran dimana perempuan seharusnya bekerja di bidang yang feminin sedangkan sebagai salah satu profesi yang mayoritas digeluti oleh kaum laki-laki maka auditor dikategorikan sebagai pekerjaan laki-laki. Sehingga, dengan kesadaran tersebut auditor perempuan di Inspektorat Kabupaten Bondowoso menjadi suatu fenomena tersendiri dan apabila seringkali mengalami ketidaknyamanan bahkan penolakan dari *auditee* yang merupakan bagian dari masyarakat Pandalungan, hal tersebut bisa dianggap sebagai konsekuensi karena telah memilih profesi di zona laki-laki.

Menjadi warga kelas dua bahkan mengalami penolakan oleh *auditee* bisa jadi dialami oleh auditor perempuan di belahan bumi manapun, tetapi seharusnya tidak berhenti sampai disana. Beberapa hasil penelitian diatas yang menunjukkan bahwa ternyata tidak ditemukan adanya perbedaan kualitas kerja antara auditor laki-laki dan perempuan menjadi dasar bahwa label warga kelas dua bahkan penolakan didasari oleh hal lain. Penolakan secara terang-terangan oleh seorang *auditee* Pandalungan bisa menjadi suatu jalan untuk mengetahui apa makna sebenarnya dari penolakan tersebut. Pengalaman apa yang mereka alami ketika pelaksanaan audit sehingga terjadi suatu penolakan terhadap auditor perempuan.

Kesadaran akan budaya patriarki dan pengalaman *auditee* Pandalungan atas pengawasan dan audit yang dilakukan oleh auditor perempuan bisa membentuk suatu makna tertentu terhadap auditor perempuan. Berkaca pada nasib akuntan perempuan suku Maori yang terpinggirkan karena masih berakarnya budaya patriarki maka seharusnya auditor perempuan di wilayah kebudayaan Pandalungan memiliki nasib yang lebih baik. Menjadi minoritas pada profesi yang didominasi laki-laki membutuhkan perjuangan tersendiri ditambah lagi tantangan dari *auditee* membuat perjuangan auditor perempuan di wilayah kebudayaan Pandalungan semakin berat. Sebenarnya banyak auditor perempuan di wilayah kebudayaan Pandalungan yang berpotensi dan berkinerja baik tetapi apabila mereka seringkali mengalami ketidaknyamanan bahkan penolakan maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja mereka sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini berharap bisa mengungkap alasan penolakan atas auditor perempuan oleh *auditee* Pandalungan.

2. Kajian Teori

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi yang dilakukan oleh Hull dan Umansky (1997) memberikan gambaran bahwa perempuan yang berkesempatan untuk meningkatkan posisinya menjadi top manajer hanya akan menemukan “*glass ceiling*” atau langit-langit kaca yang berfungsi sebagai penghalang. Seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan yang semakin menggembirakan, salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Kornberger, Carter dan Ross-Smith (2010). Mereka mengakui bahwa secara tradisional, akuntansi telah digambarkan sebagai profesi gender, dalam hal ini adalah profesi yang didominasi oleh kaum laki-laki atau bersifat maskulin tetapi saat ini perusahaan-perusahaan besar terutama *Big Four* sebagai firma jasa profesional dan akuntansi internasional telah membuat komitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender yang lebih besar porsinya dan sampai pada kesimpulan bahwa perubahan dalam praktik diskursif dari suatu organisasi merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai perubahan positif dalam hubungan gender. Perubahan model praktik firma akuntansi juga disinggung dalam penelitian Dambrin dan Lambert (2012) yang melakukan identifikasi melalui dua perpektif utama yaitu pseudo-netral dan komprehensif untuk menjelaskan kelangkaan perempuan di tingkat atas dalam profesi akuntansi. Berikutnya, mereka berpendapat bahwa salah satu cara untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam menjaga keseimbangan kehidupan kerja adalah perlunya merancang ulang seluruh model bisnis.

Pembahasan mengenai komitmen perusahaan-perusahaan bahkan *Big Four* mengenai kesetaraan gender seperti yang dilakukan oleh Hull dan Umansky (1997), Kornberger, Carter dan Ross-Smith (2010) juga Dambrin dan Lambert (2012) telah diangkat menjadi suatu isu penelitian yang menarik bagi beberapa peneliti di Indonesia untuk menguji bahwa kesetaraan gender memang sewajarnya untuk dijadikan komitmen. Hasil penelitian mereka telah membuktikan adanya kesetaraan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, diantaranya adalah penelitian dari pendekatan positivis yang dilakukan oleh Zulaikha (2006), Pasanda dan Paranoan (2013) yang meneliti pengaruh antara interaksi gender dan pengalaman audit terhadap *audit judgement*. Kedua penelitian menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh secara signifikan sedangkan pengalaman audit berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment. Salah satu penelitian yang fokus pada auditor intern pemerintah, bukan auditor yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik

(KAP) dilakukan oleh Salsabila dan Prayudiawan (2011) yang menguji pengaruh akuntabilitas, pengetahuan audit dan gender terhadap kualitas kerja auditor internal pada Inspektorat Wilayah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor internal. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor laki-laki dan perempuan sama-sama mencurahkan kemampuan dan tanggungjawabnya sebagai auditor pemerintah, sehingga keduanya dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas tanpa memandang status gender auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2006), Pasanda dan Paranoan (2013) juga Salsabila dan Prayudiawan (2011) menunjukkan bahwa gender bukan penghalang untuk dapat menghasilkan pekerjaan audit yang berkualitas.

Penelitian dengan pendekatan berbeda dilakukan oleh McNicholas, Humpries dan Gallhofer (2004) yang berusaha untuk memberikan gambaran lebih mendalam dan lebih subyektif dalam mengangkat isu gender yaitu penelitian mereka atas pengalaman perempuan Maori dalam profesi akuntansi. Penelitian mengenai perempuan Maori menemukan fakta bahwa perempuan Maori sebagai salah satu etnis di Selandia Baru tetap saja tidak bisa memiliki kedudukan yang setara dengan perempuan Pakeha (sebutan mereka untuk perempuan kulit putih atau Eropa) apalagi dengan laki-laki Maori. Budaya dan masyarakat Maori yang tidak hanya patriarkal tetapi juga misoginis/tidak suka perempuan menjadi salah satu faktor pendorong tertolaknya perempuan pada suatu profesi karena dalam masyarakat Maori, perempuan diharapkan hanya melakukan pekerjaan pekerjaan domestik dan tidak diharapkan untuk bekerja di luar rumah apalagi memiliki profesi tertentu. Terjadinya asimilasi kolonial yaitu pembauran kebudayaan Maori dan kolonialnya (budaya Inggris) tidak mengubah anggapan kaum Maori terhadap perempuan. Seperti terlihat ketika klien Maori yang berniat untuk menggunakan jasa firma akuntansi, lebih memilih akuntan Maori laki-laki, bahkan akuntan laki-laki Pakeha daripada ditangani oleh akuntan perempuan.

Merujuk pada cikal bakal konsep gender, maka gender tidak bisa terlepas dari peran budaya dan struktur sosial masyarakat. Dihubungkan dengan pendapat Lehman (1990) juga Kornberger, Carter dan Ross-Smith (2010) yang menyebutkan bahwa akuntansi adalah profesi gender atau profesi yang lingkungan kerjanya cenderung maskulin maka peran budaya memberikan pengaruh yang kuat dalam membentuk kesadaran atas peran perempuan dalam profesi mereka

sebagai akuntan dan auditor. Pelabelan perempuan sebagai warga kelas dua bahkan penolakan akuntan perempuan dalam kasus perempuan Maori selain terjadi karena model bisnis suatu firma akuntansi, hal tersebut juga imbas dari faktor budaya dan kesadaran akan posisi perempuan sebagai warga kelas dua. Meskipun saat ini telah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang terlihat dari meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mendorong tumbuhnya modernisasi yang pada gilirannya mempengaruhi nilai-nilai budaya dan pola pikir serta tindakan anggota masyarakat termasuk kaum perempuan, pada masyarakat tertentu peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan modernisasi tidak membuat mereka melakukan pergeseran nilai-nilai budaya yang signifikan.

2.2 Budaya Pandalungan

Sebelum melangkah lebih jauh, mari mengenal budaya Pandalungan terlebih dahulu. Pandalungan, merupakan salah satu masyarakat dengan budaya patriarki yang masih kental. Sebagai hasil dari “hibridasi budaya” yaitu kompromi budaya yang harmonis antara etnis Madura dan Jawa (Yuswadi, 2001), kedua etnis yang kental dengan budaya patriarkinya tersebut menyatu dengan baik dalam suatu wilayah yang diibaratkan sebagai suatu wadah atau dalam bahasa Jawa disebut dhalung sehingga pada akhirnya muncul istilah pandalungan. Masyarakat baru hasil dari hibridasi budaya yang selanjutnya disebut masyarakat Pandalungan, mayoritas bertempat tinggal di wilayah kebudayaan pandalungan yaitu merujuk pada suatu daerah di Propinsi Jawa Timur yang membentuk lekukan ladang kuda sehingga sering disebut wilayah tapal kuda. Secara administratif, wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi atas 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 9 (sembilan) Kota dimana sekitar 20% (dua puluh persen) wilayahnya merupakan wilayah kebudayaan Pandalungan. Kawasan kebudayaan pandalungan meliputi Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lumajang (Adji, 2014; Sutarto, 2006).

Salah satu wilayah kebudayaan Pandalungan yaitu Kabupaten Bondowoso bisa dianggap sebagai salah satu daerah yang mengalami hibridasi budaya sempurna antara etnis Madura dan Jawa. Sejarah Bondowoso menceritakan bahwa Raden Bagus Asrah atau Mas Ngabehi Astrotruno yang merupakan pendiri sekaligus penguasa pemerintahan pertama di Bondowoso berasal dari Bangkalan Madura. Pada tahun 1789 beliau ditugaskan untuk mengembangkan wila-

yah yang sebelumnya masih berupa hutan untuk tujuan politis sekaligus sebagai upaya menyebarkan agama Islam karena penduduk pada wilayah yang akan dituju (penduduk asli Bondowoso yang beretnis Jawa) masih menyembah berhala (<http://bondowosokab.go.id>).

Selanjutnya, terjadilah proses yang disebut oleh Yuswadi (2001) sebagai hibridasi budaya antara budaya Madura dan budaya Jawa yang membentuk budaya baru yaitu Pandalungan. Wilayah kebudayaan Pandalungan lain mengalami hibridasi budaya tidak hanya dari dua budaya dominan yaitu Madura dan Jawa tetapi diperkaya oleh budaya Arab, Cina dan Osing sehingga masyarakat Pandalungan di wilayah tapal kuda berbeda satu dengan yang lainnya. Karena letak geografis Bondowoso yang merupakan lembah ditambah lagi dengan perekonomian yang kurang berkembang, maka jumlah etnis lain selain Madura dan Jawa sangatlah sedikit sehingga bisa dikatakan tidak berperan dalam proses hibridasi budaya.

Proses hibridasi budaya antara dua budaya dominan yaitu Madura dan Jawa meliputi peleburan antara keduanya, sehingga masyarakat Pandalungan di Bondowoso merupakan cerminan dari kedua budaya tersebut. Salah satu persamaan dari kedua budaya ini adalah masih kentalnya pola keluarga patriarki yang menempatkan istri atau perempuan sebagai pihak yang mengurus pekerjaan domestik sedangkan di luar rumah tangga, laki-laki mengendalikan dan membatasi peran publik perempuan. Perasaan kurang nyaman yang dirasakan oleh pekerja perempuan dianggap sebagai suatu konsekuensi atas keberanian mereka bekerja di luar rumah, di luar adat kebiasaan yang berlaku selama ini.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian studi kasus (*case study*). Yin (2013) menyatakan bahwa studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Yin juga memberikan definisi teknis atas studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata dimana batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas, serta dilakukan pemanfaatan multisumber bukti.

Berdasar atas tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui alasan dibalik penolakan *auditee* Pandalungan terhadap auditor perempuan maka penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso karena Bondowoso sebagai salah satu wilayah kebudayaan Pandalungan yang mengalami hibridasi

budaya sempurna antara etnis Madura dan Jawa, yang masih kental dengan budaya patriarkinya. Selain itu, hampir semua obyek pemeriksaan atau *auditee* adalah orang Pandalungan yang pernah mengalami pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh auditor perempuan.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subyek beserta ekspresi, sikap serta pemahaman informan sebagai dasar utama dalam melakukan interpretasi data. Sedangkan data sekunder berupa berbagai sumber tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi informasi peneliti dan mendorong keberhasilan penelitian.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*). Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi auditor perempuan Pandalungan, auditor perempuan pendatang dan *auditee* Pandalungan. Selain informan auditor perempuan dan *auditee* Pandalungan, sebagai pelengkap juga ditambahkan beberapa informan pendukung diantaranya adalah Kyai, Budayawan, dan Kepala Desa yang mewakili tokoh masyarakat Pandalungan

Peneliti memulai dengan melakukan observasi langsung terlebih dahulu, mengunjungi lokasi tempat informan berada, membuat catatan di lapangan, dan saat pengumpulan informasi peneliti akan mencoba untuk memahami latar belakang, watak serta karakter subyek atau informan yang diteliti. Berikutnya, dari data yang telah terkumpul, membuat ringkasan dengan memberikan sandi-sandi, mencocokkan latar belakang informan berdasarkan etnis yang ada di Kabupaten Bondowoso yaitu Pandalungan dan Jawa atau lebih sering disebut pendatang. Kemudian melakukan wawancara mendalam, setelah sebelumnya mempersiapkan informan mengisi surat pernyataan keberseidaan mereka sebagai informan.

Hasil wawancara mendalam terhadap informan diklasifikasikan berdasar atas posisi informan, apakah sebagai auditor atau sebagai *auditee*. Wawancara dengan auditor perempuan meliputi bentuk-bentuk penolakan yang mereka terima dari *auditee* Pandalungan, sedangkan wawancara dengan *auditee* Pandalungan selain merupakan konfirmasi atas bentuk penolakan mereka terhadap auditor perempuan juga mengenai alasan dibalik penolakan yang mereka lakukan. Setelah diklasifikasi, data disajikan dalam bentuk deskripsi berdasar atas tema dan sub tema kemudian dianalisis menggunakan pendekatan budaya.

Pendekatan budaya yang digunakan dalam penelitian ini selain menggunakan budaya Madura se-

bagai referensi, digunakan pula pendekatan tujuh unsur-unsur budaya universal atau *cultural universal* dari kebudayaan. Unsur budaya universal yang dikemukakan dan dibahas oleh Liliwari (2014) dan Rifai (2007) meliputi sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem peralatan hidup atau teknologi sebagai unsur-unsur pokok kebudayaan atau *cultural universal*. Disebut unsur budaya universal karena ketujuh unsur tersebut selalu ada dalam suatu kebudayaan dan pada penelitian ini digunakan untuk melakukan identifikasi atas budaya Pandalungan Bondowoso. Berikutnya, identifikasi budaya yang telah dilakukan digunakan sebagai dasar justifikasi atas alasan penolakan *auditee* Pandalungan terhadap auditor perempuan baik Pandalungan maupun pendatang. Setelah dilakukan justifikasi alasan penolakan *auditee* Pandalungan berdasar *cultural universal* budaya Pandalungan Bondowoso maka berikutnya adalah penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pandalungan Bondowoso

Sejarah Bondowoso mencatat bahwa pada tahun 1789 Raden Bagus Asrah atau Mas Ngabehi Astrotruno yang merupakan pendiri sekaligus penguasa pemerintahan pertama di Bondowoso ditugaskan untuk mengembangkan dan memperluas wilayah kekuasaan Besuki ke arah selatan. Pada tahun 1794 beliau menemukan wilayah strategis yang kemudian disebut Bondowoso dan diangkat menjadi Demang di daerah yang baru tersebut dengan nama Abhiseka Mas Ngabehi Astrotruno. Tanggal 17 Agustus 1819 atau hari Selasa Kliwon, 25 Syawal 1234 H, Gubernur Hindia Belanda menjadikan wilayah Bondowoso lepas dari Besuki dengan status Keranggan Bondowoso dan mengangkat R. Bagus Assra atau Mas Ngabehi Astrotruno menjadi penguasa wilayah dan pimpinan agama dengan gelar M. NG. Kertonegoro dan berpredikat Ronggo I dengan wilayah pemerintahan meliputi Bondowoso dan Jember.

Wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso saat ini terbagi atas 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 Desa dengan kondisi dataran sebagian besar terdiri atas pegunungan dan perbukitan dengan karakteristik yang rawan terhadap terjadinya bencana alam terutama longsor, angin puyuh, dan gempa bumi akibat aktivitas gunung berapi yaitu Gunung Ijen dan Gunung Raung yang berada disisi timur Kabupaten Bondowoso (<http://bondowosokab.go.id>).

Penduduk Bondowoso mengalami apa yang disebut oleh Yuswadi (2001) sebagai hibridasi budaya

antara budaya Madura dan budaya Jawa yang membentuk budaya baru yaitu Pandalungan. Istilah Pandalungan sedikit asing ditelinga para informan, terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Hibridasi budaya yang terjadi di Bondowoso sekitar dua abad yang lalu menyisakan dominasi budaya Madura yang mengakar kuat pada masyarakat Pandalungan sehingga mereka merasa sebagai bagian dari masyarakat Madura meskipun bertempat tinggal di Pulau Jawa dan tidak memiliki garis keturunan orang Madura kecuali nenek moyang mereka yang merupakan pengikut Ki Bagus Assra yang menikah dengan penduduk asli Bondowoso. Hal tersebut ternyata berimbas pada karakteristik masyarakat Pandalungan yang sedikit banyak mengadopsi karakteristik orang Madura seperti yang dijelaskan oleh Pak Sugeng berikut :

Hampir mirip dengan orang Madura, orang Pandalungan memiliki karakteristik keras, setia kawan, rasa kekeluargaannya tinggi.

Rasa kekeluargaan atau kekerabatan yang tinggi juga dijelaskan oleh Rifai (2007) secara non fisik sistem kemasyarakatan mereka bisa dilihat dari peribahasa *rokon mara bilis* atau rukun seperti semut maksudnya adalah, kekerabatan diantara etnis Madura juga yang terjadi pada masyarakat Pandalungan diibaratkan seperti semut yang selalu rukun dalam mengerjakan hal-hal yang berat, diupayakan untuk melakukan gotong royong. Peribahasa tersebut sejalan dengan salah satu ciri masyarakat Pandalungan yang diidentifikasi oleh Sutarto (2006) yaitu bahwa ikatan kekeluargaan sangat solid sehingga penyelesaian masalah seringkali dilakukan dengan cara keroyokan. Tidak berlebihan apabila disebutkan bahwa keluarga bagi masyarakat Pandalungan adalah segalanya. Kedekatan hubungan kekeluargaan yang mereka miliki secara fisik dapat dilihat dari bentuk pemukiman tradisional mereka yaitu *tenian lanjhang* yang dihuni oleh tiga generasi lebih mempererat kekerabatan. Penjelasan berikutnya datang dari Kyai Bahrudji yang menyatakan bahwa:

Karena nenek moyang orang Bondowoso asalnya dari Madura, jadi karakteristiknya juga tidak jauh-jauh dari orang Madura meskipun jarang yang sampe carok. Keras, pemberani, agamanya kuat, taat sama Kyai, kekeluargaannya kental sekali.

Masyarakat Pandalungan memang dikenal religius, mayoritas merupakan pemeluk agama Islam. Sistem

religi masyarakat Pandalungan hampir sama dengan orang Madura yang memang dekat sekali dengan citra mengenai kepatuhan, ketaatan, dan kefanatikan mereka terhadap agama Islam. Pembawaan berkeagamaan dan ketaatan pada agama menyebabkan mereka tunduk pasrah sepenuhnya pada *se Kobasa* (Yang Maha Kuasa). Mereka secara harfiah memang sudah patuh dalam menjalankan syariat agama dan pesantren adalah pilihan utama dalam mengenyam pendidikan sehingga menjadi hal yang biasa apabila seorang Kyai yang menjadi guru sekaligus panutan keagamaan, mendapat tempat yang sangat terhormat dalam masyarakat.

Masyarakat Pandalungan mungkin bukan seni-man yang baik, tetapi lebih pada posisi sebagai penikmat seni yang terlihat dari minimnya karya seni yang secara fisik ditemukan, semuanya standar saja bahkan kebanyakan malah mengadopsi kesenian dari daerah sekitarnya kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan karakteristik mereka seperti yang dijelaskan oleh Sutarto (2006) bahwa kesenian di wilayah Pandalungan cenderung adaptif, mengadopsi dari kesenian budaya lain dan memodifikasinya sehingga bisa diterima masyarakat Pandalungan.

Bondowoso dikenal luas sebagai penghasil tape singkong yang manis dan kesat. Pengrajin tape, tidak begitu saja membagi pengetahuan mereka karena selain persaingan bisnis yang lumayan ketat di usaha penjualan tape, masyarakat Pandalungan juga tidak terbiasa membagi pengetahuan yang mereka miliki dalam bentuk tulisan. Secara fisik, tidak pernah ditemukan dokumen yang memuat tulisan mengenai pengetahuan tradisional masyarakat Pandalungan, semua diwariskan secara turun temurun.

Sebagai masyarakat dengan mata pencaharian sebagian besar adalah bertani, maka dalam menjalankan aktifitasnya mereka juga mengandalkan pengetahuan tradisional untuk menentukan waktu menanam, memupuk, memanen, dan lain sebagainya. Termasuk dalam melakukan pekerjaan lain seperti yang diungkapkan oleh Sutarto (2006) bahwa mata pencaharian masyarakat Pandalungan sebagian besar agraris tradisional, berada di pertengahan jalan antara masyarakat tradisional dan masyarakat industri sehingga tradisi dan mitos mengambil tempat yang dominan dalam kesehariannya. Tradisi turun-temurun tetap dipertahankan oleh Masyarakat Pandalungan meskipun sedikit demi sedikit sudah mulai menyerah dengan dorongan modernisasi yang mau tidak mau mulai menggeser tradisi, terlihat dari peralatan hidup masyarakat Pandalungan yang sudah mulai terbantu oleh tekno-

logi, seperti yang dikatakan oleh Bapak Budaeri yang menyatakan bahwa:

Orang Pandalungan adalah orang asli Bondowoso yang lebih dominan Madura. Karakternya keras, tetapi Pandalungan sekarang berbeda dengan Pandalungan yang dulu.

Kata-kata '*berbeda dengan Pandalungan yang dulu*' mengisyaratkan adanya pergeseran karakteristik orang Pandalungan Bondowoso. Semakin banyaknya pendatang, pendidikan, dan teknologi yang semakin maju memungkinkan terjadinya pergeseran tersebut. Bukan berarti orang Pandalungan semakin melunak tetapi orang Pandalungan Bondowoso sekarang semakin maju, melek ilmu selain ilmu agama dan melek teknologi. Pernyataan Bapak Budaeri membuka mata akan adanya suatu perubahan pada masyarakat Pandalungan. Perlahan, dan perubahan tersebut nyata dirasakan oleh masyarakat Pandalungan itu sendiri. Entah merasa terganggu atau terbantu oleh teknologi tetapi masyarakat Pandalungan yang menurut Sutarto (2006) terbuka terhadap perubahan dan mudah beradaptasi memang terbukti, meskipun pada masyarakat Pandalungan Bondowoso hal tersebut bisa dikatakan berjalan sedikit lambat.

4.2 Auditor Perempuan

Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan Internal Pemerintah (SOP PIP) Kabupaten Bondowoso mensyaratkan disusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) masing-masing wilayah Inspektur Pembantu (Irbn). Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) paling tidak memuat tentang ruang lingkup, sasaran pengawasan, SKPD yang diawasi, jadwal pelaksanaan pengawasan, jumlah auditor dan Laporan Hasil Pengawasan yang akan diterbitkan. Mengenai SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang diawasi oleh masing-masing wilayah Inspektur Pembantu (Irbn) dilakukan *rolling* setiap 2 (dua) tahun sekali dengan jadwal pengawasan rutin sekali dalam satu tahun.

Singkatnya waktu *rolling* dan terbatasnya pengawasan rutin yang dilakukan oleh auditor ternyata berdampak pada pelaksanaan tugas mereka. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa "*tak kenal maka tak sayang*" maka pemahaman auditor atas entitas yang mereka awasi bisa dikatakan terbatas. Bagi *auditee*, pepatah diatas bisa berlanjut menjadi "*tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tak mudah untuk sayang*". Lanjutan pepatah yang sedikit merusak tatanan terse-

but tercetus dari *auditee* yang terindikasi merasa tidak nyaman ketika proses pengawasan dilakukan yang tidak jarang mereka tindak lanjuti dengan perbedaan sikap yang mereka tujukan pada auditor perempuan yang bagi *auditee* laki-laki Pandalungan sering dipandang sebagai pihak yang lemah.

Beberapa sikap *auditee* Pandalungan yang sering merasa tidak nyaman saat proses pengawasan bisa berkembang menjadi beberapa bentuk yang oleh auditor perempuan diindikasikan sebagai bentuk penolakan. Penolakan secara terang-terangan terhadap auditor perempuan bisa saja terjadi tetapi yang umum dilakukan oleh *auditee* Pandalungan adalah penolakan terselubung yang berkembang dari ketidaknyamanan mereka ketika yang melakukan pengawasan atas mereka adalah seorang auditor perempuan. Terdapat beberapa bentuk penolakan yang dapat diidentifikasi oleh auditor perempuan Pandalungan dan pendatang di Inspektorat Kabupaten Bondowoso tetapi yang paling mengganggu adalah sikap tidak kooperatif mereka.

4.3 Auditee Pandalungan

Penolakan secara halus maupun semi kasar yang dialami oleh auditor perempuan terlontar dari objek pemeriksaan atau *auditee* mereka. Seperti penolakan yang dilakukan oleh *auditee* Pandalungan saat dilakukan pengawasan rutin oleh Tim Inspektorat berikut ini: "*Kaule tak poron manabi epareksa sareng auditor binik, lebbi sae manabi e genteh auditor lakek*" (saya tidak mau diperiksa/diaudit oleh auditor perempuan, lebih baik kalau diganti dengan auditor laki-laki).

Malu atau *todus* adalah salah satu alasan terbesar *auditee* enggan diaudit oleh auditor perempuan, malu karena ketelitian dan kecerewetan auditor perempuan menyebabkan banyak temuan dan konsekuensinya mereka dianggap tidak becus dalam melakukan pekerjaannya.

Tako' mon banyak temuan (takut kalau banyak temuan)...todus, engak se ta bisa alakoh (malu, nanti dianggap tidak bisa kerja).

Ketakutan *auditee* Pandalungan terutama di tingkat desa adalah Daftar Temuan Sementara (DTS) yang memuat temuan auditor dan temuan audit atas pekerjaan mereka yang paling banyak. Rasa malu atau *todus* memicu rasa takut mereka akan temuan auditor sehingga beberapa dari *auditee* menghindari auditor perempuan, seperti komentar berikut :

Ta nyaman mon epareksa bi auditor bini (tidak enak kalau diperiksa/diaudit oleh auditor perempuan)...ta nyaman e ajek benta (tidak enak atau tidak nyaman untuk diajak berbicara) mon oleh meleh, kaule lebbih meleh auditor lakek bei (kalau boleh memilih, saya lebih memilih auditor laki-laki saja)...nyaman enga' taretan (enak, seperti saudara).

Lebih jauh, tidak hanya berhenti pada rasa malu atau *todus* pada beberapa *auditee* anggapan ketidakbecusan mereka melakukan pekerjaannya ada hubungannya dengan harga diri. Seperti komentar salah seorang Kepala Desa yang menjadi *auditee*:

Mon benyak temuan (kalau banyak temuan), selain todus (selain malu) karena e gigirin bi Pak Camat (karena dimarahi/ditegur oleh Pak Camat) juga takut kalau dianggap tidak becus, deki' e reken korupsi pese (nantu dianggap korupsi uang). Harga diri mon rua, haram mon ca'en tang Kyai (harga diri kalau itu, haram kalau menurut Kyai saya)...

Harga diri adalah kata-kata sensitif bagi masyarakat Pandalungan. Seperti nenek moyang mereka yang berasal dari Madura memegang prinsip peribahasa '*ango'an poteya tolang etembang poteya mata*' atau apabila diterjemahkan, kira-kira dalam bahasa Indonesia bermakna 'lebih baik mati daripada menanggung malu' (Ma'arif, 2015: 46). Memang tidak segawat seperti apa yang dijelaskan oleh Ma'arif dalam bukunya mengenai harga diri yang menjadi motif utama pelaku carok tetapi harga diri tetap menjadi 'harga mati' bagi orang Pandalungan. Salah satu contoh adalah banyak diantara mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan tetapi tidak sudi menerima bantuan orang lain karena harga diri, tidak hanya harga dirinya sendiri tetapi harga diri keluarga besar. Sehingga, kata-kata korupsi atau koruptor akan sangat meyakinkan telinga mereka meskipun proses pembuktian seorang koruptor tidak cukup hanya dari temuan auditor. Selain itu, kepatuhan mereka terhadap Kyai masih sangat tinggi terutama bagi *auditee* Pandalungan di desa. Haram menurut Kyai berarti haram bagi mereka dan kata-kata Kyai sangat mereka pegang teguh. Hal tersebut sesuai dengan salah satu ciri masyarakat Pandalungan menurut Sutarto (2006), masyarakat Pandalungan sangat paternalistik di mana keputusan bertindak mengikuti keputusan yang diambil oleh para tokoh yang dijadikan panutan yang

paling dominan yaitu Kyai.

Apabila diurutkan, maka untuk menjaga harga diri mereka memunculkan rasa malu atau *todus* apabila tidak melakukan pekerjaannya dengan baik yang ukurannya adalah banyak tidaknya temuan dalam Daftar Temuan Sementara (DTS) auditor. Berikutnya, untuk meminimalisir temuan menurut mereka adalah dengan menghindari atau bersikap tidak kooperatif pada auditor yang teliti dan cerewet yaitu auditor perempuan.

4.4 Analisis Budaya

Salah satu alasan *auditee* Pandalungan melakukan penolakan atas auditor perempuan adalah karena mereka merasa malu atau *todus* apabila dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terdapat banyak temuan yang menurut mereka hal tersebut tidak saja mengindikasikan kinerja yang buruk tetapi juga adanya kemungkinan mereka menjadi tersangka korupsi yang menurut Kyai, sebagai panutan spiritual mereka, korupsi adalah haram hukumnya. Seperti dijelaskan oleh Rifai (2007) bahwa bagi orang Madura, gangguan pada ketenangan perasaan antara lain akibat keteguhannya memegang pendirian diremehkan, ketulusan, dan kesetiaan darma baktinya diragukan dapat menimbulkan reaksi cepat sehingga terjadi pertelingkahan atau perselisihan, disebut *caka* dalam bahasa Madura (bahasa Pamekasan atau *tokar* dalam bahasa Sumenep). Berdasar atas intensitasnya, gangguan ketenangan pada perasaan dapat menyebabkan beberapa tingkatan *caka* yaitu *pakebu*, *sengka*, *salekko*, *todus*, *parseko* hingga *malo*. Perasaan *todus* atau malu yang dialami oleh *auditee* Pandalungan diartikan sebagai ungkapan perasaan karena telah berbuat sesuatu yang dianggap berkekurangan, tidak berkesopanan, dan bisa tidak mengenakan karena tidak pada tempatnya. Berikut adalah analisis yang dilakukan berdasar atas masing-masing unsur kebudayaan universal yang terkait.

Sistem religi adalah unsur kebudayaan yang memiliki urutan pertama yaitu salah satu unsur terkuat menurut Koentjaraningrat (1974) atau yang paling sukar berubah apabila terimbas budaya lain. Masyarakat Pandalungan, sebagaimana nenek moyang mereka di pulau Madura dikenal sebagai entitas yang kental dan fanatik terhadap ajaran-ajaran keagamaan, dalam hal ini adalah agama Islam. Pada masyarakat Madura, hal ini terlihat pada tradisi-tradisi yang disandarkan pada ajaran keagamaan (Islam). Di satu sisi, seringkali agama merupakan sandaran yang kuat dalam aktivitas sosial, budaya, ekonomi, serta relasi sosial antar ma-

syarakat (Hidayati, 2009).

Tidak ada keterangan yang jelas mengenai bagaimana proses masyarakat Pandalungan mulai memeluk agama Islam. Sejarah Bondowoso hanya mencatat tahun 1789 sebagai tahun kedatangan Raden Bagus Asrah atau Mas Ngabehi Astrotruno yang merupakan pendiri sekaligus penguasa pemerintahan pertama di Bondowoso yang berasal dari Bangkalan Madura. Tugas beliau, selain mengembangkan wilayah yang sebelumnya masih berupa hutan untuk tujuan politik sekaligus juga menyebarkan agama Islam karena penduduk asli Bondowoso (yang beretnis Jawa) masih menyembah berhala (<http://bondowosokab.go.id>). Bukan hal yang mengherankan apabila hampir sama dengan masyarakat Madura yang fanatik, maka masyarakat Bondowoso juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama terutama Islam dalam keseharian mereka. Sehingga, harga diri mereka akan terluka ketika dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terdapat temuan yang mengindikasikan ketidakjujuran. Seperti komentar salah seorang Kepala Desa yang menjadi *auditee*:

Mon banyak temuan (kalau banyak temuan), selain todus (selain malu) karena e gigirin bi Pak Camat (karena dimarahi/ditegur oleh Pak Camat) juga takut kalau dianggap tidak becus, deki' e reken korupsi pese (nantu dianggap korupsi uang). Harga diri mon rua, haram mon ca'en tang Kyai (harga diri kalau itu, haram kalau menurut Kyai saya)...

Todus (malu) adalah komentar awal *auditee*, malu karena dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban mereka yang pada akhirnya akan berpengaruh pada harga dirinya. Komentar *auditee* Pandalungan diatas, selain mempermasalahkan harga dirinya yang terluka karena ada kemungkinan dimarahi atau mendapat omelan dari Camat, juga terdapat suatu kepautuhan terhadap agama dan ajaran Kyai yang mengharamkan korupsi, memakan uang rakyat. Hal tersebut sejalan dengan pembawaan manusia Madura yaitu *sokkla* (orang suci yang bermoral luhur sesuai dengan tuntunan agama atau dengan kata lain, berkeagamaan) yang berlaku baik dan tidak mendekati kemaksiatan.

Menghindari apa yang disebut *lopot sangghu* atau salah duga oleh *auditee* Pandalungan maka tugas Inspektorat Kabupaten seharusnya untuk melakukan sosialisasi mengenai hasil temuan auditor, tentang bagaimana cara membaca dan menafsirkan temuan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan unsur pembinaan yang harus selalu ditekankan atas pengawasan

yang dilakukan auditor selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sehingga tidak timbul persepsi yang berbeda antara auditor dan *auditee* yang bisa membuat pelaksanaan tugas auditor di lapangan menjadi terganggu dan tidak nyaman.

Unsur kedua dari kebudayaan adalah sistem kemasyarakatan yang terbentuk dari keluarga inti, komunitas, kelompok-kelompok formal hingga organisasi (Liliwari, 2014). Satuan sosial paling bermakna dalam sistem kemasyarakatan dari masyarakat Madura dimulai dengan penataan permukiman khas yaitu *taneyan lanjhang* atau *kampung mejhi*. Penjelasan Rifai (2007) mengenai *Taneyan Lanjhang* yang pada dasarnya terbentuk karena adat yang dianut orang Madura sesudah menikah yang termasuk dalam matri-lokal-ukurilokal (suami tinggal di rumah istri yang ikut ibunya), dimana anak wanita pertama yang menikah akan dibangun rumah oleh orang tuanya disebelah timur rumah induk, anak kedua wanita juga akan memiliki rumah di sebelah timur rumah kakaknya, dan begitu seterusnya, memperlihatkan bahwa hubungan kekerabatan terjalin sangat erat. Salah satu ciri masyarakat Pandalungan menurut Sutarto (2006) adalah ikatan kekeluargaan yang sangat solid, serupa dengan sistem kekerabatan manusia Madura.

Seperti yang terjadi pada kebanyakan suku bangsa di Indonesia, landasan ikatan kekerabatan yang penting bagi orang Madura adalah hubungan pertalian darah seketurunan dalam keluarga dengan menggunakan sistem pengelompokan *bhala* (kerabat atau keluarga) atau *taretan* (persaudaraan) secara bertingkat dengan individu atau *dhiri'* sebagai pusatnya. Apabila *dhiri'* berdiam di sebuah *taneyan lanjhang*, maka seisi kompleks perumahan itu baginya merupakan *bhala sapamolean* (keluarga sepemulangan atau sekandang) yang meliputi kakek dan nenek atau orang tua ibunya, saudara-saudara kandung perempuan ibunya dan suami mereka beserta keturunannya. Peribahasa Madura yang menyatakan *mon erek-tarek semma'* (kalau ditarik-tarik terhitung dekat) sangat cocok menggambarkan sistem kekerabatan orang Madura yang sangat menghargai hubungan kekerabatan sehingga kata "keluarga besar" bagi orang Madura merupakan arti secara harfiah. Sehingga, apabila disangkut pautkan dengan temuan auditor Perempuan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang menyebabkan *auditee* Pandalungan *todus* atau malu, maka perasaan *todus* tersebut tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, tetapi ikut dirasakan oleh "keluarga besar" mereka.

Selain kekerabatan, hal lain yang perlu diket-

hui adalah mengenai pola kepemimpinan pedesaan di mana pada masyarakat Madura menurut Rifai (2007) sering beroperasi pula kepemimpinan lain yang bertumpu pada seorang Kyai pengajar agama di pesantren. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Pandalungan. Sosok Kyai sebagai tokoh masyarakat menjadi salah satu tokoh favorit masyarakat Pandalungan. Tidak hanya sebagai penyebar ajaran Islam, seringkali Kyai dianggap sebagai guru spiritual, dan bagi masyarakat Pandalungan di desa yang kebanyakan sebagian besar pendidikannya dihabiskan di pesantren, maka peran Kyai dalam kehidupan mereka sangatlah kuat. Bondowoso merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak pesantren sehingga bukan hal aneh apabila *auditee* Pandalungan yang ditemui adalah santri salah satu pesantren terkenal di Bondowoso atau malah *auditee* tersebut adalah Kyai. Ajaran Kyai sangat merasuk dalam keseharian masyarakat Pandalungan sehingga perasaan *todus* atau malu akibat temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh auditor perempuan yang diterjemahkan oleh *auditee* Pandalungan sebagai korupsi dianggap menyalahi ajaran Kyai mereka yang menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan haram.

Sistem pengetahuan masyarakat Pandalungan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga saat ini, pengetahuan lokal dan tradisional hanya diwariskan berdasarkan ingatan dan turun-temurun semata. Ditambah lagi sumber daya manusia terutama pada masyarakat Pandalungan Desa yang seringkali tidak mengenyam pendidikan tinggi mengakibatkan sering terjadi salah paham. Salah satunya adalah keterbatasan *auditee* Pandalungan dalam menerjemahkan temuan auditor perempuan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dianggap memperlakukan mereka. Perasaan *todus* atau malu yang mereka rasakan tidak dibarengi dengan keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka sehingga kesalahan serupa tidak terulang atau paling tidak mereka berusaha bisa membaca Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sehingga tidak terjadi salah paham yang berujung pada penolakan terhadap auditor perempuan.

Berikutnya, sistem bahasa masyarakat Pandalungan yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa pengantar sehari-hari juga turut berperan serta dalam menimbulkan salah paham antara *auditee* Pandalungan dan auditor perempuan. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang menjadi efektif apabila kedua belah pihak menggunakan bahasa yang sama. Kebanyakan auditor perempuan menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan *auditee* Pandalungan yang ternyata tidak fasih berbahasa Indo-

nesia. Hal tersebut membuat *auditee* Pandalungan terutama Pandalungan Desa enggan untuk berkomunikasi. Perasaan enggan untuk berkomunikasi karena tidak bisa berbahasa Indonesia tersebut berlanjut pada macetnya komunikasi dengan auditor menghasilkan temuan pengawasan yang mengungkapkan kinerja buruk mereka yang berujung pada rasa *todus* atau malu.

Kesenian masyarakat Pandalungan yang sering ditampilkan adalah Singo Ulung, yaitu suatu tarian rakyat yang diambil dari legenda di daerah Prajekan Bondowoso. Menceritakan mengenai pertarungan yang berakhir dengan persahabatan antara Juk Seng dan Jasiman. Pelajaran yang dapat diambil dari legenda yang hingga saat ini masih diceritakan adalah bahwa Singo Ulung menggambarkan keberanian, dan pentingnya memiliki ilmu karena bisa menambah teman dan saudara seperti Juk Seng yang berani untuk menjelajahi daerah baru dan menjalin persahabatan dengan Jasiman yang sama-sama berilmu tinggi. Sayangnya, pesan moral dari legenda Juk Seng dan Jasiman tidak menginspirasi semua *auditee* Pandalungan. Tidak semua *auditee* Pandalungan mau meningkatkan kompetensi mereka untuk mengurangi temuan hasil pengawasan yang mereka anggap membuat malu atau *todus* malahan muncul komentar:

Din redin tapi cereme (cantik-cantik tapi cerewet)...nyak-tanyakan maloloh (bertanya terus menerus).

Komentar *auditee* Pandalungan di atas memperlihatkan bahwa sebagai orang Pandalungan, mereka menyukai seni yang indah, apalagi salah satu ciptaan Tuhan yaitu perempuan cantik, tetapi apabila terdapat suatu hal yang membuat mereka tidak nyaman (*nyak-tanyakan maloloh* atau bertanya terus menerus) maka seakan-akan *redinna* (cantiknya) auditor perempuan tidak ada artinya bagi mereka.

Sistem mata pencaharian masyarakat Pandalungan menurut Sutarto (2006) pada tingkatan agraris tradisional, berada di pertengahan jalan antara masyarakat tradisional dan masyarakat industri sehingga tradisi dan mitos mengambil tempat yang dominan dalam kesehariannya. Tetapi, tidak seperti orang Madura yang memperlakukan perempuan secara setara di sawah, meskipun mereka mengerjakan hal yang lebih ringan daripada laki-laki, pada masyarakat Pandalungan laki-laki tidak memperlakukan perempuan sebagai *partner* dalam pekerjaan mengelola pertanian atau perempuan hanya berfungsi untuk menyelesaikan ma-

salah domestik saja. Sehingga, perasaan *todus* atau malu, tidak hanya merujuk pada ajaran Kyai yang menyatakan bahwa korupsi adalah haram tetapi terdapat pula unsur gengsi. *Todus* atau malu karena yang menemukan dan melakukan koreksi atas kinerja mereka adalah perempuan yang pada keseharian, tidak dianggap setara.

Sistem peralatan hidup atau teknologi pada masyarakat Pandalungan sudah mulai berkembang dengan pesat tak terkecuali Pandalungan Desa. Melek teknologi sedang gencar akhir-akhir ini, salah satunya adalah penggunaan *smartphone* dan *laptop* untuk membantu kegiatan keseharian. *Auditee* Pandalungan di desa yaitu Kepala Desa yang berkesempatan memperoleh bantuan *laptop*. Tetapi, sayangnya tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga seringkali menimbulkan keprihatinan. Akibatnya, laporan yang menjadi tanggung jawab mereka terbengkalai. Bisa ditebak hasil berikutnya adalah perasaan *todus* atau malu, tidak hanya karena mereka terbukti tidak bisa mengoperasikan *laptop*, tetapi kinerja mereka yang seharusnya meningkat dengan bantuan teknologi, malah menjadi temuan auditor karena terbengkalai.

5. Simpulan

Berdasar atas identifikasi budaya yang telah dilakukan maka pertanyaan penelitian mengenai alasan penolakan *auditee* Pandalungan terhadap auditor perempuan baik Pandalungan maupun pendatang bisa terjawab. Setelah dilakukan justifikasi terhadap unsur pokok kebudayaan atau *cultural universal*, alasan dari bentuk penolakan yaitu berpura-pura tidak bisa berbahasa Indonesia untuk membingungkan auditor, meragukan kemampuan auditor perempuan dalam melakukan pengawasan dan sikap *auditee* Pandalungan yang tidak kooperatif memiliki alasan yang unik dan menarik yang bila dilihat dari sisi budaya yaitu rasa *todus* atau malu.

Timbulnya rasa *todus* atau malu yang merupakan reaksi dari temuan auditor perempuan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bisa dijelaskan dengan tujuh unsur budaya universal yaitu sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem peralatan hidup atau teknologi.

Sekelumit gambaran mengenai *auditee* Pandalungan telah diberikan oleh penelitian ini sekaligus mengungkap alasan penolakan mereka atas auditor perempuan. Prinsip harga diri orang Madura yang diadopsi oleh masyarakat Pandalungan, dalam hal ini

adalah *auditee* Pandalungan memberikan suatu nuansa baru bagi auditor perempuan sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) bahwa patuh pada kode etik saja tidak cukup tetapi mempelajari budaya serta adat kebiasaan *auditee* ternyata juga tidak bisa diabaikan.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dalam konteks yang serupa agar menggunakan sudut pandang dan metode yang berbeda, misalnya menggunakan sudut pandang budaya osing (Banyuwangi), budaya arek, atau budaya Mataraman, selain itu, yang perlu diperhatikan adalah mencari informasi mengenai waktu yang tepat untuk melakukan penelitian sehingga bisa lebih maksimal.

Daftar Rujukan

- Adji, K. B. (2014). *Ensiklopedia Babad Bumi Jawa (Buku Pintar Sejarah Terbentuknya Daerah-daerah di Pulau Jawa)*. Jogjakarta: Araska Publisher.
- Budiati, A. C. (2010). Aktualisasi Diri Perempuan dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan terhadap Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Mengaktualisasikan Diri). *Pamator*, 3(3), 51-59.
- Dambrin, C., & Lambert C. (2012). Who is She and Who are We? A Reflexive Journey in Research into the Rarity of Women in the Highest Ranks of Accountancy. *Critical Perspective on Accounting*, 23, 1-16.
- Hidayati, T. (2009). Perempuan Madura antara Tradisi dan Industrialisasi. *Karsa*, 16(2), 62-74.
- Hull, R. P., & Philip H. U. (1997). An Examination of Gender Stereotyping as an Explanation for Vertical Job Segregation in Public Accounting. *Accounting Organizations and Society*, 22(6), 507-528.
- Kirkham, M. L., & Loft, A. (2001). The Lady and the Accounts: Missing from Accounting History. *Accounting Historians Journal*, 28(1), 66-80.
- Komori, N. 2007. The 'Hidden' History of Accounting in Japan: An Historical Examination of the Relationship between Japanese Woman and Accounting. *Accounting History*, 12(3), 329-358
- Kornberger, M., Carter, C., & Ross-Smith, A. (2010). Changing Gender Domination in a Big-Four Accounting Firm, Flexibility, Performance, and Client Service in Practice. *Accounting, Organizations and Society*, 35, 775 – 791.
- Lehman, C., (1990), *The Importance of Being Earn-*

- est: Gender Conflicts in Accounting. Advances in Public Interest Accounting*, 3, 137-157.
- Liliweri, A. (2014). *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media.
- Ma'arif, S. (2015). *The History of Madura: Sejarah Panjang Madura dari Kerajaan, Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Jogjakarta: Araska Publisher.
- Mc Nicholas, P., Humphries, M., & Gallholer, S. (2004). Maintaining the Empire, Maori Women's Experiences in The Accountancy Profession. *Critical Perspectives on Accounting*. 15, 57-93.
- Narsa, I M. (2006). *Sex-Role Streotype dalam Rekrutmen Pegawai Akuntansi dan Keuangan: Observasi terhadap Pola Rekrutmen Terbuka di Media Masa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 8, No. 2. hlm. 99-106.
- Pasanda, Erna.Paranoan, Natalia. (2013). Pengaruh Gender dan Pengalaman Audit terhadap Audit Judgement. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 330-507.
- Rifai, M. A. (2007). *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasannya*. Jogjakarta: Pilar Media.
- Salsabila, A., & Prayudiawan, H. (2011). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Audit, dan Gender terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal (Studi Empiris pada Inspektorat Wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 4(1), 155-175.
- Sutarto, A. (2006). "Sekilas tentang Masyarakat Pandalungan". Makalah disampaikan pada acara Pembekalan Jelajah Budaya 2006 yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Tanggal 7-10 Agustus 2006.
- Trisnaningih, S., & Iswati, S. (2003). Perbedaan Kinerja Auditor Dilihat dari Segi Gender (Studi Empiris pada KAP di Jawa Timur). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1036-1047.
- Yin, K. Robert. (2013). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Yuswadi, Hary. (2008). *Budaya Pandalungan Multikulturalitas dan Hibridasi Budaya antar Etnik dalam Pemetaan Kebudayaan di Propinsi Jawa Timur: Sebuah Upaya Pencarian Nilai-nilai Positif*. Jember: Biro Mental Spiritual Pemerintah Propinsi Jawa Timur Bekerjasama dengan Kompyawisda Jatim, 2008, 56-62. Diakses Mei 2013 dari (<http://jawatimuran.Wordpress.com>).
- Zulaikha. (2006). Pengaruh Interaksi Gender, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Auditor terhadap Audit Judgement (Sebuah Kajian Eksperimental dalam Audit Saldo Akun Persediaan). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*, 1-22.